

## **BAB 6**

### **KERANGKA RENCANA INDUK PENGELOLAAN AIR SECARA MENYELURUH**

#### **6.1 Kebijakan untuk Perumusan Rencana Induk**

Bab ini mendiskusikan dan mengajukan suatu kerangka Rencana Induk Pengelolaan Air Secara Menyeluruh. Kebijakan perumusan Rencana Induk adalah:

- (1) Pengelolaan yang layak atas air dan daerah aliran sungai sangatlah penting bagi kelanjutan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan. Rencana Induk ini menunjukkan adanya suatu dasar dan suatu arahan keseluruhan atas pengelolaan air di DAS Musi.
- (2) Rencana Induk tidak ditujukan atas kepentingan proyek, namun Rencana induk harus lebih memfokuskan pada apa yang dianggap penting, apa yang dianggap mendesak, yang dianggap menyeluruh pada DAS Musi.
- (3) “Komprehensif” pada Pengelolaan Air Secara Menyeluruh terdiri dari beberapa ide berikut ini:
  - Permasalahan untuk DAS Musi secara keseluruhan
  - Permasalahan yang berhubungan dengan banyak sektor, sebagai contoh. Kualitas air dan pasokan air, perusakan DAS dan kualitas air.
  - Permasalahan konflik antar sektor atau antar pemilik

#### **6.2 Syarat Utama dalam Perumusan Rencana Induk**

##### **6.2.1 Latar Belakang Target Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah**

Latar Belakang Target Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah ditujukan sebagai suatu latar belakang umum dalam perumusan Rencana Induk. Kesemua hal tersebut sudah dibahas dalam Bab 2 dari laporan ini, dan hal-hal penting ringkasannya sebagai berikut:

##### **Latar Belakang Nasional**

Setelah krisis moneter tahun 1997, Pemerintah Indonesia mengeluarkan strategi pembangunan, yang diartikulasikan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), 1999-2004. Ditetapkan 4 (empat) petunjuk dalam membina organisasi pemerintahan dan keseluruhan bangsa terhadap pembangunan yang berkelanjutan dan perluasan pembangunan. Diantara permasalahan-permasalahan utama tersebut, perlu digarisbawahi dalam Studi saat ini atas re-organisasi system administrasi pemerintah yang lebih memfokuskan pada otonomi daerah dan publisitas keuangan secara transparan.

Kebijakan dalam sektor pengairan, Pemerintah melakukan suatu pembaharuan yang drastis.

Berdasarkan GBHN, Strategi Pembangunan jangka menengah, maka dibentuklah Program Pembangunan Nasional Lima Tahunan (PROPENAS, 2000-2004). PROPENAS ini didasarkan atas kebijaksanaan desentralisasi di segala aspek pembangunan nasional, yang hampir berbeda dengan rencana pembangunan tahunan sebelumnya. Arahannya bagi pembangunan dan pengelolaan sumber daya air yang terdapat dalam PROPENAS termasuk untuk membentuk suatu jaringan dan kelembagaan untuk pengumpulan dan pengelolaan data hidrologis untuk melengkapi/memfasilitasi pengelolaan air secara efektif dan efisien; untuk mengendalikan pencemaran permukaan air melalui suatu peraturan dan penegakan hukum, terutama bagi daerah aliran, wilayah industri dan wilayah kota; untuk melindungi daerah aliran sungai maka harus dapat ditingkatkan lagi kegiatan perlindungan dan pemanfaatannya.

Undang-undang Otonomi yang baru (UU22/99) dan Undang-undang Neraca Fiskal (UU25/99) merupakan undang-undang dalam pencapaian pedoman yang ditetapkan dalam GBHN dan PROPENAS. Pada sektor pengairan, Undang-undang tentang Sumber Daya Air yang baru, yakni amendmen dari undang-undang No.11/74 sedang dinantikan persetujuannya oleh DPR pusat. Peraturan Pemerintah mengenai Pengelolaan Sumber Daya Air (draft) juga telah disiapkan dan dinantikan sebagai penegakan atas UU yang baru.

### **Target Pembangunan Daerah**

Setelah terjadinya perubahan system administrasi (desentralisasi), pemerintah daerah juga telah menyiapkan rancangan pembangunan jangka menengah seperti Rencana Strategi (RENSTRA), Program Pemerintah Daerah (PROPEDA), atau Kerangka Kerja Dasar (POLA DASAR). Hampir semua rencana pembangunan daerah termasuk dalam target sebagai bahan pertimbangan, yaitu, Pemberdayaan Sumber Daya Manusia; pembangunan ekonomi dengan memberdayakan sebaik mungkin sumber daya lokal dan karakteristik lokal; Keseimbangan pelaksanaan pembangunan antara konservasi lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan; serta, pembangunan infrastruktur dasar terutama di daerah yang terisolasi.

#### **6.2.2 Tahun Target dan Kerangka Kerja Ekonomi dan Sosial**

Tahun target untuk rencana induk ditetapkan pada tahun 2020 dengan pertimbangan bahwa dalam 15 hingga 20 tahun ke depan dan mengingat penyelesaian dari Pembangunan Jangka Panjang II (PJP II) selesai pada bulan Maret 2019. Populasi yang ada di DAS Musi diproyeksikan untuk tahun sebagai berikut (proyeksi ini dibuat berdasarkan data Kabupaten yang lama dan Kotamadya):

**Tabel 6.2.1 Proyeksi Populasi dan Tingkat Pertumbuhan Tahunan (1.000 orang)**

Kabupaten/Kotamadya	2002	2005	2010	2020
Palembang	1.506 (2,1%)	1.598 (2,0%)	1.752 (1,8%)	2.058 (1,5%)
Ogan Komering Ulu	1.202 (1,7%)	1.263 (1,6%)	1.365 (1,5%)	1.568 (1,3%)
Ogan Komering Ilir	1.019 (2,1%)	1.083 (2,0%)	1.189 (1,8%)	1.403 (1,5%)
Muara Enim	749 (2,1%)	795 (2,0%)	873 (1,8%)	1.028 (1,5%)
Lahat	690 (1,3%)	717 (1,3%)	763 (1,2%)	853 (1,1%)
Musi Rawas	672 (2,3%)	717 (2,2%)	794 (2,0%)	946 (1,6%)
Musi Banyuasin	1.309 (2,9%)	1.422 (2,7%)	1.609 (2,4%)	1.984 (1,9%)
Jumlah	7.146 (2,1%)	7.565 (1,9%)	8.344 (2,0%)	9.840 (1,7%)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mendatang diproyeksikan berdasarkan target yang disusun dalam PJP II, PROPENAS dan lainnya oleh masing-masing sektor sebagai suatu scenario pertumbuhan menengah, sebagai berikut:

**Tabel 6.2.2 Hasil Estimasi PDRB Mendatang  
 (tanpa migas, 2000 harga konstan)**

Kabupaten/ Kotamadya	PDRB Aktual tahun 2000 (Rp. miliar)	PDRB tahun 2020 (Rp. miliar)	Pertumbuhan tahun 2000-2020 (% p.a.)
Palembang	8.147	18.858	4,3
OKU	3.230	6.967	3,9
OKI	2.916	6.205	3,8
Muara Enim	3.129	5.986	3,3
Lahat	2.258	4.815	3,9
Musi Rawas	1.710	3.623	3,8
MUBA	4.501	9.429	3,8
Jumlah	25.890	55.883	3,9

### 6.3 Tujuan Akhir Pengelolaan Air secara Menyeluruh di DAS Musi

Tujuan akhir pengelolaan air secara menyeluruh ini disusun pada daerah aliran dengan berpedoman pada petunjuk daerah dan nasional, yakni:

- (1) Meningkatkan kesejahteraan mental dan fisik masyarakat melalui pengelolaan yang layak atas DAS.
- (2) Memelihara pembangunan dengan mempertimbangkan konservasi lingkungan
- (3) Menerapkan pembangunan daerah yang adil, seimbang dan berkelanjutan di seluruh wilayah DAS

Memperkuat tujuan untuk mencapai Pengelolaan Air secara menyeluruh yang diatur oleh masing-masing komponen yang ada pada Rencana induk seperti yang dibahas dalam Bab 7.

#### **6.4 Perumusan Komponen Rencana Induk -Lebih memfokuskan pada apa yang seharusnya harus dilakukan saat ini-**

Komponen Rencana Induk sudah dirumuskan dari tinjauan pengelolaan air secara komprehensif yang didasarkan atas permasalahan masing-masing sektor yang diidentifikasi melalui pelaksanaan studi dan analisa, penelitian lapangan, pertemuan konsultasi masyarakat.

- Komponen 1: Pengelolaan Tata Guna Air
- Komponen 2: Pengelolaan Dataran Banjir
- Komponen 3: Konservasi dan Rehabilitasi DAS
- Komponen 4: Perbaikan Lingkungan Air di Kota
- Komponen 5: Pemantauan Pembangunan Jaringan
- Komponen 6: Perkuatan Kelembagaan

Permasalahan		Pedoman Pengelolaan	Komponen Pengelolaan Air secara Komprehensif di DAS	
<i>Penggunaan Air</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kekurangan air</li> <li>◆ Keseimbangan Air sampai tahun 2002</li> <li>◆ Keseimbangan tataruang. Keseimbangan air untuk anak sungai rawa pasang surut (daerah terpencil)</li> <li>◆ Konflik kebijaksanaan sektor rasio penggunaan air irigasi pasang surut Budidaya air</li> <li>◆ Kesulitan Naviagasi</li> <li>◆ Kurangnya pengguna tenaga air mikro</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Diperlukan program-program untuk keseluruhan DAS dan multi-sektor</li> <li>◆ Pengelolaan tata ruang irigasi dan pengembangan rawa dengan melihat ketersediaan lahan dan sumberdaya air yang diperlukan</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b><u>Komponen 1:</u></b> <b><u>Pengelolaan Tata Guna Air</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Mempertahankan ketersediaan air atas wilayah yang luas</li> <li>● Pembangunan rawa dan irigasi berkelanjutan</li> <li>● Pemanfaatan air hujan pada wilayah rawa pasang surut</li> <li>● Pengelolaan budi daya air</li> <li>● Perluasan pemanfaatan air bagi pariwisata</li> </ul> </div>	
<i>Lingkungan</i>	<p><u>Alami</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Keburukan kualitas air Daerah perkotaan</li> <li>◆ Daerah Sungai</li> <li>◆ Kerusakan SDA</li> </ul> <p><u>Sosial</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kondisi hidup yang keras di daerah perpindahan penduduk di pasang surut</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Diperlukan pengelolaan sebagai jalan keluar keluar yang mendasar terhadap permasalahan yang ada dalam DAS</li> <li>◆ Merupakan hal yang penting untuk memberikan perhatian yang lebih terhadap perbaikan lingkungan</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b><u>Komponen 2:</u></b> <b><u>Pengelolaan Dataran Banjir</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pembuatan Zona dan pengendalian tata guna lahan</li> <li>● Ramalan dan Peringatan Banjir</li> <li>● Pengelolaan Aliran Sungai yang berkelanjutan</li> </ul> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-left: 20px;"> <p><b><u>Komponen 3: Konservasi dan Rehabilitasi SDA</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pencegahan erosi tanah</li> <li>● Rehabilitasi dan Konservasi Lingkungan alami</li> </ul> </div>	
<i>Banjir</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Kerusakan resim air pada musim kemarau</li> <li>◆ Erosi tebing sungai dan sedimentasi</li> <li>◆ Kerusakan banjir bandang</li> <li>◆ Genangan air hujan di daerah perkotaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Pemantauan terhadap data dan informasi yang diperlukan untuk pengelolaan</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b><u>Komponen 4:</u></b> <b><u>Perbaikan Lingkungan Air di Wilayah Kota</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pengelolaan komunitas drainase</li> <li>● Konservasi wilayah bantaran sungai</li> <li>● Rehabilitasi aliran saluran drainase</li> <li>● Perbaikan sistem drainase</li> </ul> </div>	
<i>Kelembagaan</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Penyebaran informasi yang tidak baik</li> <li>◆ Kurangnya pembinaan dalam penegakan hukum</li> <li>◆ Kurangnya kemampuan sumberdaya manusia</li> <li>◆ Kurangnya koordinasi antar organisasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Usaha lanjutan dalam perbaikan kelembagan yang sejalan dengan WATSAP dan peraturan pemerintah yang baru mengenai sumber daya air yang dibutuhkan</li> </ul>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b><u>Komponen 6:</u></b> <b><u>Perkuatan Kelembagaan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Perkuatan Kelembagaan</li> <li>● Peningkatan keorganisasian</li> <li>● Pengembangann Sumber Daya Manusia</li> </ul> </div>	
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b><u>Komponen 5: Pemantauan Pembangunan Jaringan</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pemantauan pengembangan sistem hidrologi</li> <li>● Pemantauan pengembangan sistem kualitas air</li> <li>● Pemantauan tata guna air</li> <li>● Program pengembangan database hidrologi</li> </ul> </div>	